

Dinamika politik dalam proses pemilihan ketua MPR periode 2009-2014 = The political dynamics of people's consultatives assembly chairman election period of 2009-2014

Fajar Supriyatna, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365475&lokasi=lokal>

Abstrak

Studi tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini belum banyak ditemukan. Setelah perubahan Undang Undang Dasar 1945, banyak kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihilangkan sehingga membuatnya tidak menarik lagi untuk diteliti. Namun sesungguhnya ada bagianbagian yang masih menarik untuk diteliti dalam rangka memperkaya khasanah ilmu politik di Indonesia. Salah satunya adalah proses pemilihan Pimpinan MPR. Proses pemilihan Pimpinan MPR yang terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua ini senantiasa berlangsung dinamis, tidak pernah sama dari masa ke masa, baik dalam hal aturan, mekanisme dan pelaksanaannya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terpilihnya Taufiq Kiemas secara aklamasi sebagai Ketua MPR. Taufiq Kiemas didukung oleh PDI Perjuangan yang menempatkan diri sebagai partai oposisi. Terpilihnya Taufiq Kiemas ini didukung oleh hampir semua partai politik yang ada di MPR. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban mengapa bisa tercapai konsensus untuk menetapkan Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR secara aklamasi dan bagaimana konsensus tersebut dapat tercapai.

Sebagai pijakan teoritis, Penelitian ini menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf sebagai teori utama, didukung juga dengan teori demokrasi dari Joseph Schumpeter, teori sistem dua kamar Giovanni Sartori, serta teori elit dari Robert Michels. Untuk mengungkap fenomena yang diteliti, digunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi dokumen dan literatur serta wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan Ketua MPR. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa konsensus yang dicapai terkait konflik politik yang terjadi dalam pemilihan Ketua MPR ditentukan oleh peran para aktor politik yang memiliki pengaruh kuat dalam partai politik yang terlibat selain itu superioritas mayoritas dalam demokrasi di Indonesia juga berpengaruh bagi tercapainya sebuah konsensus.

Implikasi teoritis menunjukkan bahwa konflik dan konsensus dalam proses pemilihan Ketua MPR periode 2009-2014 merupakan bagian dari demokrasi. Konflik yang terjadi tidaklah bersifat destruktif, hal ini ditunjukkan dengan tercapainya konsensus untuk mengakhiri konflik. Konsensus yang terjadi merupakan kombinasi dari kompromi dari pihak-pihak yang berkonflik dan pemaksaan kekuasaan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, selain itu peran dari elit partai politik juga sangat menentukan dalam pencapaian konsensus ini. Hal ini memperkuat pendapat Maswadi Rauf tentang konflik dan konsensus, juga menegaskan kebenaran hukum besi oligarkiyang dikemukakan oleh Robert Michels.

<hr>

The study of the People's Consultative Assembly (MPR) is rarely written. After the amendment of the 1945 constitution, many authorities of the Assembly are eliminated so it makes less attractive to be researched. In fact there are parts that still worthy and interesting to be studied in order to enrich the political science in

Indonesia. Leaders election process is the one of interesting things to be researched. The process is very dynamic, never be same from time to time in terms of rules, mechanisms and executions.

This research is motivated by the acclamation of Taufiq Kiemas as Chairman of the Assembly in the election process. Taufiq Kiemas was nominated by PDI-P which is reached in third position in 2009 Indonesian general elections. Taufiq Kiemas was supported by almost all factions in MPR. So this study aims to find answers about why the consensus achieving the assembly leaders election which was won by Taufiq Kiemas with acclamation way and how that consensus can be agreed.

The main theory applies in this research is Maswadi Rauf's conflict and consensus theory. It is also completed by the theory of democratic by Joseph Schumpeter, bicameral system of Giovanni Sartori, and elite theory of Robert Michel. This study used a qualitative approach with an explanatory analysis method. The data was collected by the study of documents and literatures as well as in-depth interviews of ten MPR faction/groups leaders members that involved in the process, the vice chairmen of the Assembly, and a member of the lobbying team of Taufiq Kiemas. The result of this research shows that the consensus can be attained due to the role of political actors with strong influence in the political parties as well as can be attained by the superiority of the majority in Indonesian democracy.

Theoretical implications show that the conflict and consensus in the election process of MPR Leaders is a part of democracy. The conflict is not destructive, therefore it reaches the consensus. The Consensus is a combination of a compromise of the parties and the coercive power of the strong towards the weak. The role of political elite also the crucial factor in achieving the consensus. This confirms Maswadi Rauf's theory about the conflict and consensus also confirms the truth of the iron law of oligarchy proposed by Robert Michels.